

Berikut ini lampiran 33 Prolegnas RUU tahun 2021 dan 246 Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020 – 2024.

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2021**



NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KET
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I	
2.	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/KOMISI III/ PEMERINTAH	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/KOMISI IV	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	DPR/KOMISI V	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/KOMISI VI	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/KOMISI VII	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/KOMISI VIII	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR/KOMISI IX	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.	DPR/KOMISI X	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	DPR/KOMISI XI /PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/ANGGOTA	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR/ANGGOTA	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ANGGOTA	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	PEMERINTAH	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-	PEMERINTAH	

	Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).		
28.	Rancangan Undang-Undang tentang tentang Ibukota Negara.	PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	PEMERINTAH	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.	DPD	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2021**

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

**DAFTAR
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TAHUN 2020-2024**



NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUJ DISIAPKAN OLEH	KET
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	DPR	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	

30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan	DPR	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR	
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan	DPR	
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring	DPR	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	DPR	
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	RUU Carry Over
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	

59.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik	DPR	
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR	
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR	
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR	
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol	DPR	
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak	DPR	
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	DPR	
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR	
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	DPR	
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	

94.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR	
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
102.	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan	DPR	
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR	
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)	DPR	
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah	DPR	
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak	DPR	
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/PEMERI NTAH/DPD	
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERI NTAH	
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERI NTAH	

125.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/PEMERINTAHAN	
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/PEMERINTAHAN	
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAHAN	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAHAN	
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAHAN	
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/PEMERINTAHAN	<i>Omnibus Law</i>
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAHAN	
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAHAN	
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/PEMERINTAHAN	RUU Carry Over
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/PEMERINTAHAN	RUU Carry Over
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/PEMERINTAHAN	
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAHAN	
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/PEMERINTAHAN	
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAHAN	
139.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/PEMERINTAHAN	
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAHAN	
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAHAN	
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/PEMERINTAHAN	
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAHAN	
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/PEMERINTAHAN	
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/PEMERINTAHAN	
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAHAN	
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/PEMERINTAHAN	
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAHAN	

149.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR/PEMERINTAHAN	
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/PEMERINTAHAN	
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAHAN	
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAHAN	
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAHAN	
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAHAN	
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	DPR/PEMERINTAHAN	
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR/DPD	
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD	
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR/DPD	
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	DPR/DPD	
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD	
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	

178.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
179.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
180.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTA H	
181.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTA H	
182.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTA H	
183.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTA H	
184.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTA H	
185.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTA H	
186.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTA H	
187.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan	PEMERINTA H	
188.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTA H	
189.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTA H	
190.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTA H	
191.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTA H	
192.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTA H	
193.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha	PEMERINTA H	
194.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTA H	
195.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTA H	
196.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTA H	
197.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTA H	
198.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	PEMERINTA H	
199.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTA H	
200.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTA H	
201.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTA H	
202.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTA H	
203.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTA H	
204.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTA H	
205.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTA H	<i>Omnibus Law</i>
206.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTA H	

207.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTA H	
208.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTA H	
209.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTA H	<i>Omnibus Law</i>
210.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTA H	
211.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTA H	
212.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTA H	<i>Omnibus Law</i>
213.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTA H	
214.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	PEMERINTA H	
215.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTA H	
216.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTA H	
217.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTA H	
218.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTA H	
219.	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTA H	
220.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTA H	
221.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	PEMERINTA H	
222.	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	PEMERINTA H	
223.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTA H/DPD	
224.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	
225.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
226.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
227.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
228.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
229.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
230.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian	DPD	
231.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
232.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD	
233.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
234.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
235.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
236.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD	

237.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
238.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
239.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	
240.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD	
241.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
242.	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
243.	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah	DPD	
244.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
245.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	

**DAFTAR
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN TAHUN 2020-2024**

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang